

7. & 8. Informasi dan Bukti Pemenuhan Peraturan Perundangan K3

PT Mulia Farmindo Sejahtera

Dokumen No.	Revisi	Tanggal Efektif	Referensi ISO
D-SMK3-007	1.2	2025-12-09	6.1.3

5.1 Informasi Peraturan Perundangan Utama K3

Daftar berikut adalah landasan hukum utama K3 yang wajib dipatuhi MFS, yang mencerminkan kewajiban dari aspek hak asasi hingga teknis operasional:

No.	Peraturan Perundangan	Persyaratan yang Relevan	Bukti Pemenuhan (Contoh)
1.	UUD 1945 Pasal 27 ayat (2)	Hak setiap warga negara atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan (Dasar filosofi K3).	Komitmen K3 dalam Visi dan Misi Perusahaan.
2.	UU No. 1 Tahun 1970 (Keselamatan Kerja)	Kewajiban Pengusaha menyediakan APD, syarat keselamatan di tempat kerja, hak/kewajiban pekerja.	Ketersediaan dan Penggunaan APD Wajib (Catatan Inventaris APD).
3.	UU No. 13 Tahun 2003 (Ketenagakerjaan)	Perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja bagi tenaga kerja.	Sertifikat Pemeriksaan Kesehatan Berkala Pekerja.
4.	ISO 45001:2018 (Sistem Manajemen K3)	Komitmen untuk menerapkan kerangka kerja K3 berstandar internasional secara terstruktur dan berkelanjutan.	Sertifikasi ISO 45001 dan Dokumen Prosedur SMK3.
7.	UU No. 41 Tahun 2014 (Peternakan dan Kesehatan Hewan)	Kewajiban Biosecuriti, pencegahan penyakit hewan (termasuk potensi Zoonosis) yang berdampak pada pekerja.	Protokol Biosecuriti dan Prosedur Kesehatan Hewan.

5.2 Bukti Pemenuhan Peraturan Perundangan (No. 8)

Bukti pemenuhan dikumpulkan dan ditinjau setiap triwulan. Contoh:

- Sertifikat Pemeriksaan Kesehatan Berkala Pekerja (Memenuhi UU No. 13/2003).
- Tanda Terima Laporan Kecelakaan Kerja kepada Disnaker (jika ada) (Memenuhi UU No. 1/1970).
- Catatan Kalibrasi Alat Ukur K3 (Sesuai Permenaker No. 9/2010).

5.3 Pembaruan dan Tinjauan

Manajer K3 bertanggung jawab untuk memantau perubahan regulasi baru yang relevan dengan industri peternakan setiap 6 bulan dan memperbarui daftar ini.